



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2025



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BANDUNG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung disusun sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2025 merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan organisasi perangkat daerah selama tahun 2025 dan memberikan gambaran dan pedoman untuk seluruh pejabat struktural maupun pelaksana sesuai dengan kedudukan, kewenangan dan tugas pokok dan fungsi di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mendukung terwujudnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Daerah tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Kami berusaha dan berupaya secara optimal menyusun laporan ini sesuai dengan ketentuan serta kaidah-kaidah yang telah diamanatkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun kami menyadari belum dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya, oleh karena itu dengan tangan terbuka kami mengharapkan semua masukan

serta saran yang konstruktif untuk perbaikan dan penyempurnaan penyusunan laporan yang akan datang. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2025.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua pihak yang berkepentingan khususnya bagi para pimpinan unit kerja lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dan umumnya seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, sehingga mempunyai komitmen yang tinggi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan.

Bandung, 31 Desember 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

YAYAN AHMAD BRILYANA, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19731127 199303 1 003

Daftar Isi

Kata Pengantar	2
Daftar Isi.....	4
Daftar Gambar	6
Daftar Tabel.....	7
BAB I PENDAHULUAN	10
a. Gambaran Umum Organisasi	10
b. Tugas dan Fungsi	11
c. Isu Strategis yang dihadapi	20
d. Dasar Hukum	22
e. Sistematika Penulisan	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2025.....	25
a. Perencanaan Strategi.....	25
b. Indikator Kinerja Utama (IKU)	30
c. Perjanjian Kinerja (PK)	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025.....	35
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	35
1. Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	36
a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini	37
b. Perbandingan Realisasi kinerja dengan Tahun Sebelumnya	38
c. Realisasi kinerja dengan Akhir Tahun Berjalan	39
d. Realisasi Kinerja dengan standar nasional.....	39
e. Analisa Penyebab Keberhasilan /Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan	40
f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	43
g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	45
2. Indeks Kepuasan Masyarakat.....	58
a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini	60
b. Perbandingan Realisasi kinerja dengan Tahun Sebelumnya	63
c. Realisasi kinerja dengan Akhir Tahun Berjalan	63
d. Realisasi Kinerja dengan standar nasional.....	64
e. Analisa Penyebab Keberhasilan /Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan	64
f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	65



g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	66
B. Realisasi Anggaran	68
 BAB IV PENUTUP.....	 82

Daftar Gambar

Gambar 1. Gambar Eselonering Pegawai Diskominfo	14
Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Diskominfo	15
Gambar 3. Grafik Berdasarkan Pendidikan	16
Gambar 4. Gambar Standar Operasioanl Prosedur (SOP) Pungumpulan LKIP Diskominfo	17
Gambar 5. Akumulasi Persentase Target Renstra 2025-2029	29
Gambar 6. Indeks SPBE Pemerintah Kota Bnadung Tahun 2025	39
Gambar 7. Laporan Hasil Survai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	61

Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 1.1 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan	16
Tabel 1.2 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan Pangkat	16
Tabel 1.3 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan	18
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Diskominfo dalam rangka pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Bandung Tahun 2025-2029	27
Tabel 2.2 Target tujuan dan sasaran jangka menengah Diskominfo Kota Bandung Tahun 2025-2029	26
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 Sebelum Perubahan	31
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 Setelah Perubahan	31
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 Sebelum Perubahan	33
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 Setelah Perubahan	34
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025	35
Tabel 3.2 Analisis pencapaian sasaran Tahun 2025 SPBE	37
Tabel 3.3	

TINGKAT AKUNTABILITAS KEUANGAN	45
TABEL 3.4 Capaian Program Tahun 2025	46
Tabel 3.5 Realisasi Kinerja Kigeiatan Sasaran 1 Diskominfo Tahun 2025	56
Tabel 3.6 Analisis pencapaian sasaran Tahun 2025 IKM	60
Tabel 3.7 TINGKAT AKUNTABILITAS KEUANGAN	67
TABEL 3.8 Capaian Program Tahun 2025	67
Tabel 3.9 Realisasi Kinerja Sasaran 2 Diskominfo Tahun 2025	68
Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2025	70
Tabel 3.11 PERBANDINGAN TARGET DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024, DAN PER TRIWULAN TAHUN 2025	73
TABEL 3.12 PERBANDINGAN PERSENTASE CAPAIAN KINERJA, TAHUN 2024, DAN PER TRIWULAN TAHUN 2025	74
TABEL 3.13 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET RENSTRA 2025-2029	74
TABEL 3.14 PERBANDINGAN PERSENTASE CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET RENSTRA 2025-2029	75



BAB I

PENDAHULUAN

a. Gambaran Umum Organisasi

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Komunikasi dan Informatika dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional. Untuk terwujudnya tata pemerintahan yang baik diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil

guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun LKIP. Penyusunan LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

b. Tugas dan Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung menjalankan tugas pokok, yaitu; berdasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung dan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor : 9 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung mempunyai tugas pokok berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian.

Adapun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor : 9 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas tersebut, yaitu;

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan lingkup Komunikasi dan Informatika, Persandian dan statistik;
2. Pelaksanakan kebijakan lingkup, Komunikasi dan Informatika, Persandian dan statistik;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup komunikasi dan informatika, Persandian dan statistik;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas lingkup komunikasi dan informatika, persandian dan statistik; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut;

1. Merumuskan dan menetapkan Renstra, Renja, Program kerja dan anggaran serta kinerja Dinas berdasarkan kebijakan umum daerah kota sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membina dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Wali Kota agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efesien;
3. Merumuskan kebijakan lingkup komunikasi dan informasi, persandian dan statistik;
4. Menyelenggarakan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
5. Menyelenggarakan pengelolaan aplikasi informatika;
6. Menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi;
7. Menyelenggarakan statistik sektoral;
8. Menyelenggarakan administrasi Dinas;

9. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja daerah yang meliputi; LKPJ, LPPD, LKIP dan laporan-laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota Sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

A. Sekretaris, membawahi:

1. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub. Bagian Keuangan
3. Kelompok Jabatan Fungsional

B. Bidang Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi :

Membawahi kelompok jabatan fungsional.

C. Bidang Infrastruktur TIK;

Membawahi kelompok jabatan fungsional.

D. Bidang Diseminasi Informasi;

Membawahi kelompok jabatan fungsional.

E. Bidang Aplikasi Informatika, Persandian dan Keamanan Informasi;

Membawahi kelompok jabatan fungsional.

F. Bidang Data dan Statistik;

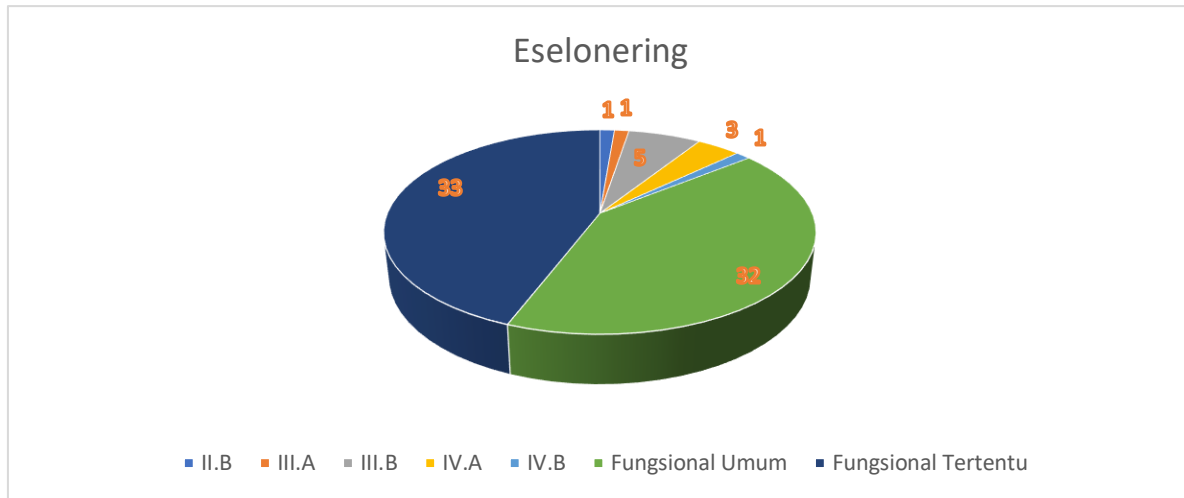
Membawahi kelompok jabatan fungsional.

G. UPT Radio Sonata

Kelompok Jabatan Fungsional

Sebagai ilustrasi struktur kepegawaian di Diskominfo Kota Bandung, dapat dilihat pada gambar 1 di bawah.

Gambar 1. Gambar Eselonering Pagawai Diskominfo



❖ Jumlah Personil Susunan

Dalam upaya melaksanakan tugas dan pokok pelayanan Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2024 memiliki jumlah sebanyak 77 orang PNS, terdiri dari;

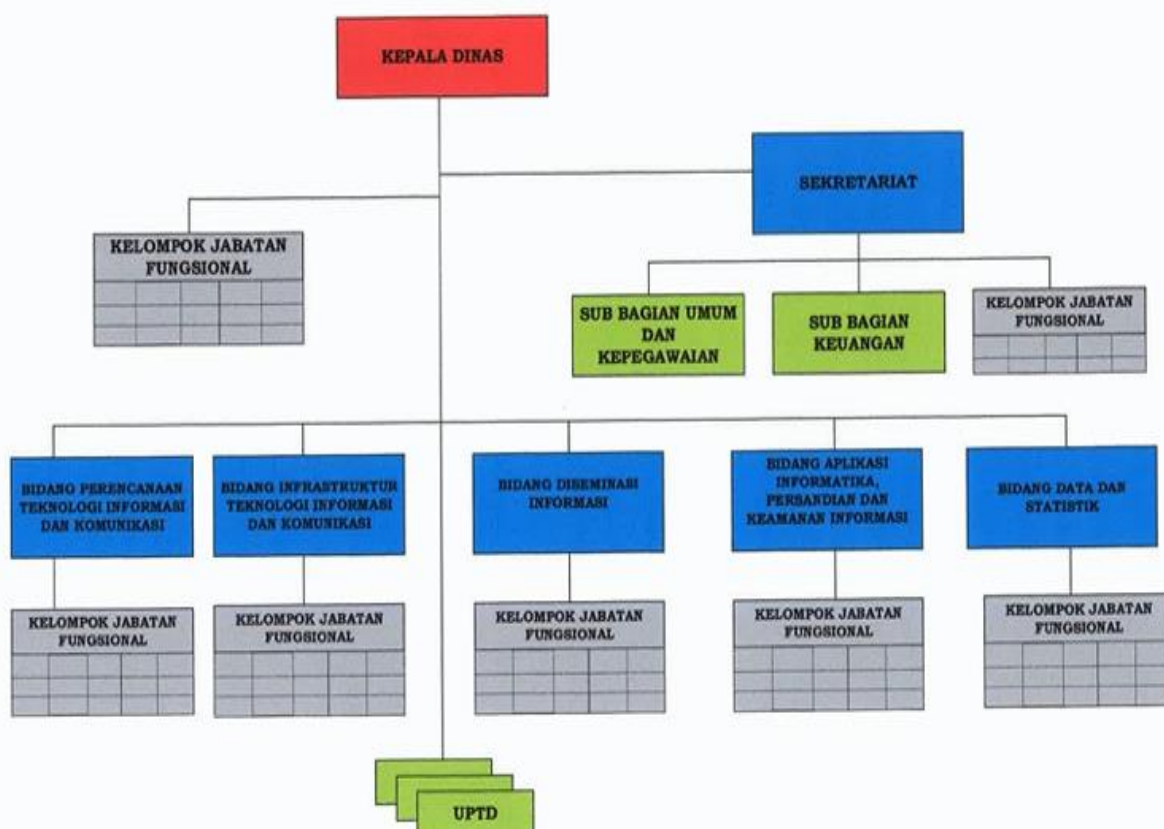
- Eselon II b sebanyak 1 orang;
- Eselon III a sebanyak 1 orang;
- Eselon III b sebanyak 5 orang;
- Kepala Seksi dan Kepala UPT (Eselon IV a) sebanyak 18 orang dan Ka Bagian Tata Usaha UPT (Eselon VI b) sebanyak 1 orang, fungsional umum 33 orang serta fungsional tertentu sebanyak 15 orang.

Gambar 2.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

14

XIV. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Sumberdaya Dinas Komunikasi dan Informatika yang dimiliki mencakup

Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung memiliki pegawai sebanyak 77 orang dengan 69 orang Pegawai Negeri Sipil dan 8 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dari jumlah pegawai sebanyak 77 orang tersebut, terdiri dari; Kepala Dinas (Eselon II b) sebanyak 1 orang,

Sekretaris (Eseleon III a) sebanyak 1 orang, Kepala Bidang (Eselon III b) sebanyak 5 orang, Kepala Seksi dan Kepala UPT (Eselon IV a) sebanyak 18 orang dan Ka Bagian Tata Usaha UPT (Eselon VI b) sebanyak 1 orang, fungsional umum 32 orang serta fungsional tertentu sebanyak 34 orang.

TABEL 1.1.
KONDISI KEPEGAWAIAN BERDASARKAN ESELON JABATAN

Eselon	Jumlah	Persentase
II.b	1	1%
III.a	1	1%
III.b	5	7%
IV.a	3	4%
IV.b	1	1%
Fungsional Umum	32	42%
Fungsional Tertentu	34	44%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung berdasarkan yang dimiliki, dapat di lihat Tabel 1.2.

TABEL 1.2
KONDISI KEPEGAWAIAN BERDASARKAN PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN

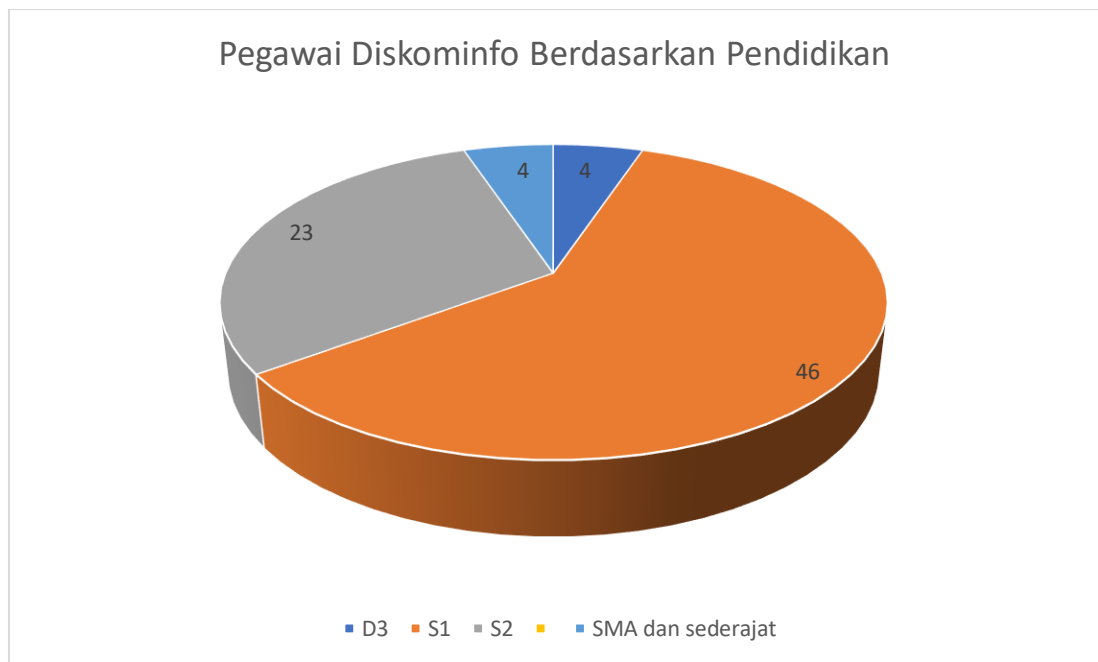
Pendidikan Akhir	Jumlah	Persentase
SLTA	4	5%
D3	4	5%

S1	47	60%
S2	23	30%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

Gambar 3.

Grafik Berdasarkan Pendidikan



Dari seluruh jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung yang memiliki pendidikan S2 sebanyak 23 orang (29%), yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 46 orang (56%), yang memiliki D3 sebanyak 5 orang (6%), yang memiliki pendidikan SLTA sebanyak 3 orang (4%),

Terkait dengan LKIP, evaluasi akan dilakukan terhadap jumlah pegawai, serta pendidikan dari sumber daya yang ada di Diskominfo Kota Bandung untuk melihat apakah sudah diperlukan penambahan SDM,

peningkatan pendidikan, atau kursus-kursus/ bimtek yang diperlukan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja Diskominfo Kota Bandung.

Berdasarkan Kepwal No.800/Kep.1189-Bagor/2025 dan hasil analisa jabatan data pegawai di atas, ideal pegawai yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika seharusnya sebanyak 165 pegawai, sedangkan pegawai saat ini sebanyak 77 orang sehingga masih kekurangan pegawai sebanyak 88 orang. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.3 di bawah ini;

Tabel 1.3
Kondisi dan Kebutuhan Pegawai Diskominfo
Berdasarkan Jabatan

NO	URAIAN JABATAN	Sesuai Kebutuhan Kepwal No.800/Kep.1189- Bagor/2025	Kondisi Saat ini	KURANG/LEBIH
1	Kepala	1	1	0
2	Pranata Komputer (Madya)	5		-5
3	Sandiman (Madya)	1		-1
4	Manggala Informatika (Madya)	2		-2
5	Sekretaris	1	1	0
6	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1	0
	Arsiparis (Terampil)	1	1	0
	Arsiparis (Mahir)	1		-1
	Arsiparsi (Pertama)	1	1	0
	Penelaah Teknis Kebijakan	2	1	-1
	Pengolah Data dan Informasi	2	1	-1
	Pengolah Administrasi	2	1	-1
7	Kepala Sub Bagian Keuangan	1	1	0
	Penelaah Teknis Kebijakan	2	1	-1
	Pengolah data dan informasi	4	2	-2
8	Perencana Muda	1		-1
	Perencana Pertama	1		-1
	Penelaah Teknis Kebijakan	2	1	-1

	Pengolah data dan informasi	1		-1
9	Kepala Bidang Perencanaan TIK	1	1	0
	Pranata Komputer (Muda)	4	3	-1
	Pranata Komputer (Pertama)	3	2	-1
	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Komunikasi	3	5	2
	Pengolah data dan informasi	4	3	-1
10	Kepala Bidang Infrastruktur TIK	1		-1
	Pranata Komputer (Muda)	4	3	-1
	Pranata Komputer (Pertama)	5	5	0
	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Komunikasi	6	2	-4
	Pengolah data dan informasi	4	4	0
11	Kepala Bidang Diseminasi Informasi	1	1	0
	Pranata Hubungan Masyarakat (Muda)	3	3	0
	Pranata Hubungan Masyarakat (Pertama)	4	4	0
	Pranata Hubungan Masyarakat (Penyelia)	1		-1
	Pranata Hubungan Masyarakat (Mahir)	1		-1
	Pranata Hubungan Masyarakat (Terampil)	6		-6
	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Komunikasi	2		-2
	Penelaah Teknis Kebijakan	2	2	0
	Pengolah data dan informasi	3	1	-2
12	Kepala Bidang Aplikasi Informatika, Persandian dan Keamanan Informasi	1	1	0
	Pranata Komputer (Muda)	8	5	-3
	Pranata Komputer (Pertama)	8	5	-3
	Sandiman (Muda)	2	1	-1
	Sandiman (Pertama)	4		-4
	Manggala Informatika (Muda)	2		-2
	Manggala Informatika (Pertama)	3		-3
	Penata Kelola Sistem Dan Teknologi Komunikasi	3		-3
	Pengolah data dan informasi	2		-2
	Penelaah Teknis Kebijakan	2	2	0
13	Kepala Bidang Data dan Statistik	1	1	0
	Statisi Muda	3	3	0
	Statisi Pertama	3	3	0

	Pranata Komputer (Muda)	2		-2
	Pranata Komputer (Pertama)	4	1	-3
	Penelaah Teknis Kebijakan	3	1	-2
	Pengolah data dan informasi	2		-2
14	Ka.UPT Radio	1	1	0
	Penelaah Teknis Kebijakan	2		-2
	Pengelola Siaran	14		-14
	Pengelola Layanan Operasional	2		-2
15	Ka. Subbag. TU UPT.Radio	1	1	0
	Pengolah Data	1		-1
	Pengadministrasi Perkantoran	1		-1
	JUMLAH	165	7 7	-88

* KETERANGAN

	Belum Terisi
	Kelebihan

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung

c. Isu Strategis yang Dihadapi

Pemerintah daerah dituntut untuk tanggap terhadap akan kebutuhan warganya. Oleh karena itu sebagai Dinas yang membawahi urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian dan urusan statistik, Diskominfo Kota Bandung dituntut untuk peka terhadap isu-isu strategis yang berkaitan dengan tupoksi Dinas. Beberapa isu sudah dirumuskan di dalam Renstra 2024-2026, namun seiring perjalanan dan perkembangan, terutama teknologi media digital, isu-isu ini berkembang dan sudah menjadi bagian dari kebutuhan warga Kota Bandung. Isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika adalah:



d. Dasar Hukum

Dasar Hukum

Dasar hukum menjadi acuan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung adalah :



Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung

Peraturan Walikota Bandung Nomor : 9 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

e. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Yaitu;

<i>BAB I PENDAHULUAN</i>	Meliputi; Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika
<i>BAB II PERENCANAAN KINERJA</i>	Meliputi Perencanaan Strategis (sebelum dan setelah review), IKU dan Perjanjian Kinerja.
<i>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</i>	Meliputi; Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
<i>BAB IV PENUTUP</i>	Kesimpulan dan Rekomendasi

Teknik Pengumpulan Data serta Teknik Monitoring dan Evaluasi

Dalam melakukan pengumpulan data kinerja, Diskominfo Kota Bandung menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengumpulan data kinerja subag program di Diskominfo sebagai acuan. Dalam SOP ini tergambarkan pihak-pihak yang terlibat, alur kerja serta data yang mengalir dan dipertukarkan. SOP ini akan di review kemudian sesuai dengan kebutuhan peningkatan kinerja Dinas.

Gambar 4
Sistim Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan data LKIP Diskominfo

SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA

Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
	Kepala Diskominfo	Sekretaris Diskominfo	Sub Koordinator Program	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
Mengumpulkan data kinerja dari setiap bidang dan UPT				Data	30	Data	
Mengumpulkan informasi data-data kinerja untuk melengkapi laporan				Data	30	Data	
Mengolah Data Kinerja yang sudah terkumpul				Dokumen	120	Dokumen	
Membuat Draft Laporan Kinerja				Dokumen	90	Dokumen	
Melapor kepada Atasan	No			Laporan	15	Laporan	
Menganalisa Laporan Kinerja				Laporan	160	Laporan	
Menyetujui Laporan Data				Laporan	15	Laporan	
Membuat Laporan Akhir terkait kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung	Yes			Laporan	160	Laporan	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
YAYAN AHMAD BRILYANA, S.Sos, M.Si
NIP. 19731127 199303 1 003

SOP di atas dijalankan secara efektif dalam 620 menit atau dalam 10 jam lebih 34 menit, namun adakalanya dikarenakan ketidaksiapan bahan, data yang masih “mentah” dan kurang teradministrasi dengan baik, serta terbatasnya waktu dikarenakan aktifitas dalam menjalankan tupoksi, SOP tersebut kurang efektif dijalankan. Kurang lebih diperlukan waktu satu minggu dalam waktu kerja untuk mengumpulkan seluruh keperluan, data, dan bahan-bahan dalam penyusunan LKIP Tahun 2025 ini.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

a. Perencanaan Strategis

Perencanaan kinerja Diskominfo Kota Bandung didasarkan atas visi, misi, tujuan, dan sasaran Dinas yang telah dicantumkan di Dokumen Rencana Strategis 2025-2029. Dimana Dokumen Renstra tersebut telah disusun sedemikian rupa mengakomodir kondisi dan kebutuhan masyarakat Kota Bandung karena disadari masyarakat urban merupakan sebuah sistem kompleks dimana aktor-aktor penyusunnya yaitu manusia, teknologi, dan lingkungan saling terhubung dan mempengaruhi. Lahir dan berkembangnya pusat-pusat masyarakat yang bersifat urban akan selalu menghadirkan tantangan-tantangan baru seperti kemiskinan, kemacetan, kesenjangan sosial, kriminalitas, berkurangnya sumberdaya alam, polusi, masalah kesehatan dan tantangan-tantangan lainnya.

Situasi dan kondisi ini akan memunculkan berbagai isu-isu strategis yang berkaitan dengan pertimbangan daerah baik yang bersifat internal maupun eksternal yang harus diantisipasi dan diatasi dengan sebaik-baiknya.

Dalam mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut, peran Komunikasi dan informatika sangatlah penting. Pemerintah daerah khususnya harus dapat menjalin proses Komunikasi dan informatika yang harmonis dengan masyarakat. Pemerintah daerah tidak dapat berjalan sendiri dalam mengembangkan potensi daerahnya apabila tidak didukung oleh masyarakat.

Begitu juga sebaliknya masyarakat tidak akan mendukung pemerintah, apabila tidak memiliki pengetahuan yang cukup akan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Untuk menyelesaikan tantangan dan persoalan perkotaan tersebut diperlukan strategi dan pendekatan yang komprehensif, inklusif, efektif dan efisien. Pembangunan

berbasis Smart City telah menjadi tren pembangunan kota atau daerah di dunia dan menjadi keniscayaan yang harus diadaptasi daerah atau kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Pembangunan Smart City tidak sekedar mengedepankan efisiensi birokrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) namun juga bagaimana membangun masyarakat dengan menjadikan infrastruktur dan sarana TIK sebagai faktor pendukung atau *enabler*.

Kegiatan pembangunan ini tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga harus dilakukan dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Sebagai langkah nyata yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung, sesuai dengan apa yang diamanatkan pada Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 8 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung 2025-2029.

Atas dasar itulah Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya memberikan pelayanan sesuai dengan urusannya yaitu urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian yang seimbang kepada masyarakat maupun lembaga-lembaga lain melalui berbagai kegiatan hariannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

TABEL. 2.1
TUJUAN DAN SASARAN DISKOMINFO DALAM RANGKA PENCAPAIAN
VISI DAN MISI RPD KOTA BANDUNG TAHUN 2025-2029

NO	TUJUAN (RPJMD)	INDIKATOR (RPJMD)	SASARAN (RPJMD)	INDIKATOR (RPJMD)	TUJUAN (PD)	INDIKATOR (PD)	SASARAN (PD)	INDIKATOR (PD)
1	Penguatan fondasi transformasi tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Reformasi Birokrasi	Terciptanya tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berdampak	Nilai Reformasi Birokrasi General	Terciptanya tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berdampak	Nilai Reformasi Birokrasi General	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Lingkup Kewenangan Diskominfo
							Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Diskominfo	Indeks Kepuasan Masyarakat PD

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

Target dan Analisis Target Renstra 2025-2029

Sebagai acuan pengukuran akuntabilitas kinerja dari tahun ke tahun, digunakan target yang dicantumkan di dalam Renstra Diskominfo Tahun 2025-2029. Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika ada 1 tujuan dan 1 indikator, sedangkan sasaran memiliki 2 sasaran yaitu; 1. Meningkatnya Penguatan fondasi transformasi tata kelola pemerintahan dan layanan publik; 2 dan Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Diskominfo.

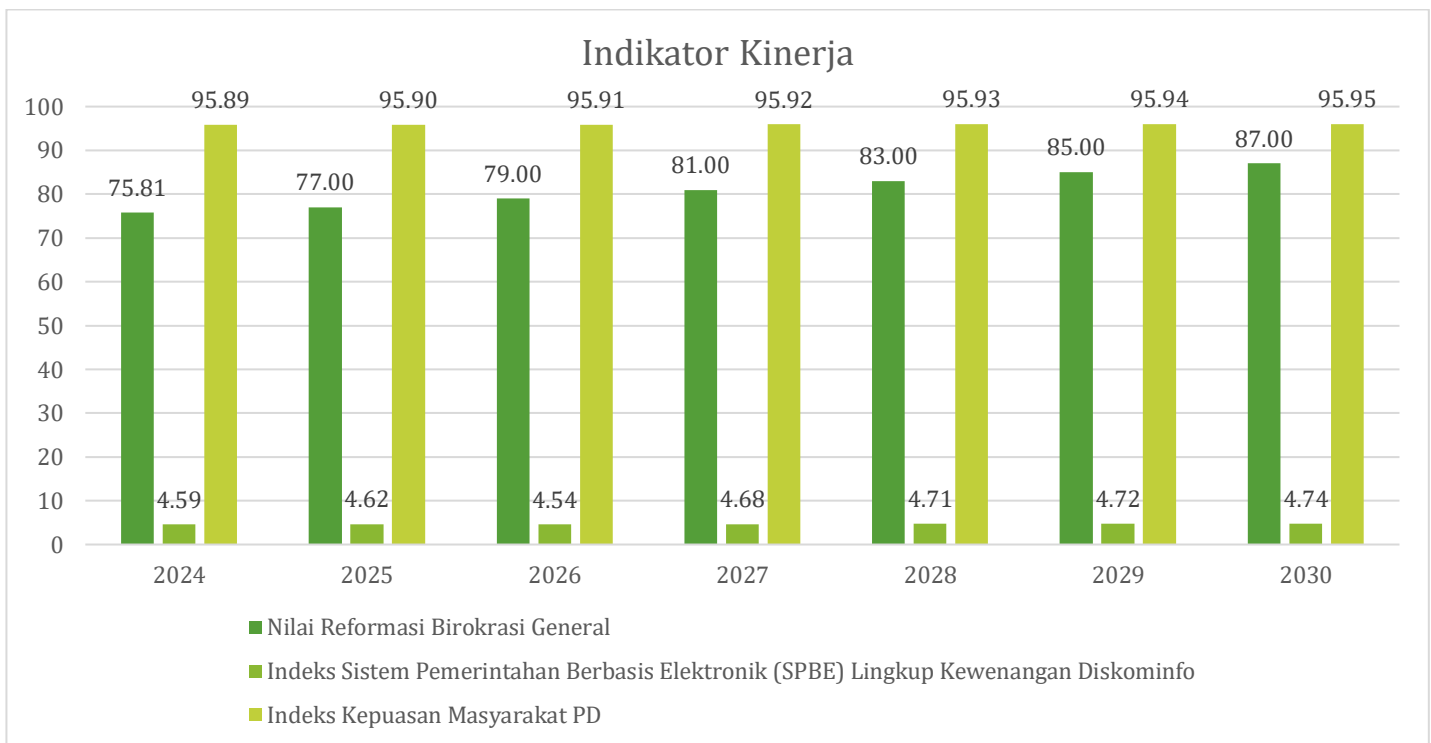
Adapun target tujuan, sasaran dan indikator Renstra Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini;

TABEL 2.2
TARGET TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DISKOMINFO KOTA
BANDUNG TAHUN 2025-2029

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Kinerja pada awal (2024)	TARGET KINERJA SASARAN RENSTRA 2025-2029 PADA TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Terciptanya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berdampak		Nilai Reformasi Birokrasi General	75,81	77	79	81	83	85	87
		Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Lingkup Kewenangan Diskominfo	4,59	4,62	4,65	4,68	4,71	4,72	4,74
		Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Diskominfo	Indeks Kepuasan Masyarakat PD	95,89	95,90	95,91	95,92	95,93	95,94	95,95

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

Jika dilihat dari perkembangan target pada Renstra Tahun 2025-2029 ditafsirkan sebagai target 100% kinerja pada akhir tahun Renstra ada 2 indikator yang menggunakan pengukuran prosentase dan 2 indikator yang menggunakan poin, maka kita dapat melihat peningkatan target renstra per-tahun pada Gambar 5 di bawah ini;

GAMBAR 5. AKUMULASI PERSENTASE TARGET RENSTRA 2025-2029


Diskominfo Kota Bandung

1. Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Pelaksanaan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Hasil evaluasi yang diberikan oleh Kementrian PANRB ini menjadi indikator sejauhmana pelaksanaan SPBE yang ada pada instansi pemerintah pusat maupun daerah, dari hasil evaluasi dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan SPBE yang terpadu sehingga dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkaulitas, terintegrasi dan berkesinambungan serta bermanfaat bagi masyarakat, pelaku usaha, aparatur sipil negara dan instansi pemerintah.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator ini merupakan amanat dari Permen PANRB No.14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan kepada masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah perlu disusun IKM sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data IKM dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

b. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mengukur sejauhmana Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung telah mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, pada masing-masing tujuan strategis ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus pada setiap tahunnya. Indikator kinerja masing-masing tujuan tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika. Indikator Kinerja Utama berikut target yang ingin dicapai pada Tahun 2025 tidak ada perubahan yaitu;

Tabel 2.3
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2025
SEBELUM PERUBAHAN

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	REALISASI	TARGET
			2024	2025
1	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE/Smart City)	A	B
1.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,59	Sangat Baik (3,70)
1.2	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Diskominfo	Indeks Kepuasan Masyarakat	95,89	88,50

Tabel 2.4
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2025
SETELAH PERUBAHAN

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2025
----	--------	---------	-------------------	----------------------------	------------------------------------

1	Terciptanya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berdampak		Nilai Reformasi Birokrasi General	75,81	77
		Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Lingkup Kewenangan Diskominfo	4,59	4,62
		Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Diskominfo	Indeks Kepuasan Masyarakat	95,89	95,90

*IKU Diskominfo

c. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung tidak ada perubahan, tetapi adanya perubahan penambahan anggaran untuk mendukung Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut;

Tabel 2.5
PERJANJIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2025
SEBELUM PERUBAHAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3,70
2	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Diskominfo	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	88,50
3	Meningkatnya nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	A
4	Meningkatnya Akuntabilitas Pelayanan Diskominfo	Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti	Prosentase	100%

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.082.919.874	APBD
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	7.570.788.800	APBD
3	Program Aplikasi Informatika	9.616.785.281	APBD
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1.000.000.000	APBD
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	415.700.000	APBD

Sumber : DPA Murni 2025 Diskominfo

Tabel 2.6
PERJANJIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2025
SETELAH PERUBAHAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Lingkup Kewenangan Diskominfo	Nilai	4,62
2	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Diskominfo	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	95,90
3	Meningkatnya nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	A
4	Meningkatnya Akuntabilitas Pelayanan Diskominfo	Prosentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti	Prosentase	100%

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.181.929.545	APBD Perubahan
2	Program Informasi dan Komunikasi Publik	16.544.108.536	APBD Perubahan
3	Program Aplikasi Informatika	880.017.910	APBD Perubahan
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	409.024.208	APBD Perubahan
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	24.399.695.476	APBD Perubahan

Sumber : DPA Perubahan 2025 Diskominfo



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung telah menetapkan 2 sasaran dalam Indikator Kinerja Utama yang akan dicapai, ke 2 sasaran tersebut diukur dengan menetapkan 2 indikator kinerja utama yang akan dilaksanakan oleh bidang-bidang di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

TABEL 3.1
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	4,62	4.66	100,87%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	95,90	96,05	100,16%

Keterangan; IKU Dinas Komunikasi dan Informatika

Dari tabel 3.1 tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian IKU yang mencerminkan keberhasilan rata-rata di atas 100% dari target 2 target yang ditetapkan. Dalam LKIP Tahun 2025, semua indikator adalah IKU (Indikator Kinerja Utama).

Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan Tahun 2025

Pada bagian ini akan dijelaskan perhitungan capaian kinerja, formulasi. Perhitungan capaian kinerja, berikut dengan analisis kinerja dari setiap indikator sasaran.

Penjelasan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran akan data serta menunjukkan validitas data kinerja yang hitung dalam capaian kinerja.

Sasaran 1: Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Hal ini telah diatur dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE, di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi yang ada di Pemerintah Kota Bandung.

Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Pemerintah Kota Bandung untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Pemerintah Kota Bandung.

Agar penilaian ini dilaksanakan secara efektif dan obyektif, maka Dinas Komunikasi dan Informatika dengan pedoman pada evaluasi yang dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan evaluasi SPBE dan dukungan oleh Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Pada sasaran pertama yang dicapai pada Tahun 2025 ini, Meningkatnya Penguatan fondasi transformasi tata kelola pemerintahan dan layanan publik dengan

indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dapat dilihat pada Tabel 3.2 di bawah ini;

TABEL. 3.2
ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024		%	TAHUN 2025		%	TAHUN 2026	TAHUN 2029
		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		TARGET RPJMD	TARGET RPJMD
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,50	4,59	131,14	4,62	4,66	100,87	4,65	4,72

Instrumen/ cara perhitungan indikator

Tujuan indikator ini adalah untuk mengukur suatu nilai indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE. Adapun target pematangan level SPBE pada Tahun 2025 adalah Triwulan 1 (persiapan); Triwulan 2 (proses pelaksanaan pematangan SPBE); Triwulan 3 (proses pelaksanaan pematangan SPBE); dan Triwulan 4 (Level pematangan SPBE). Formula perhitungan capaian indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

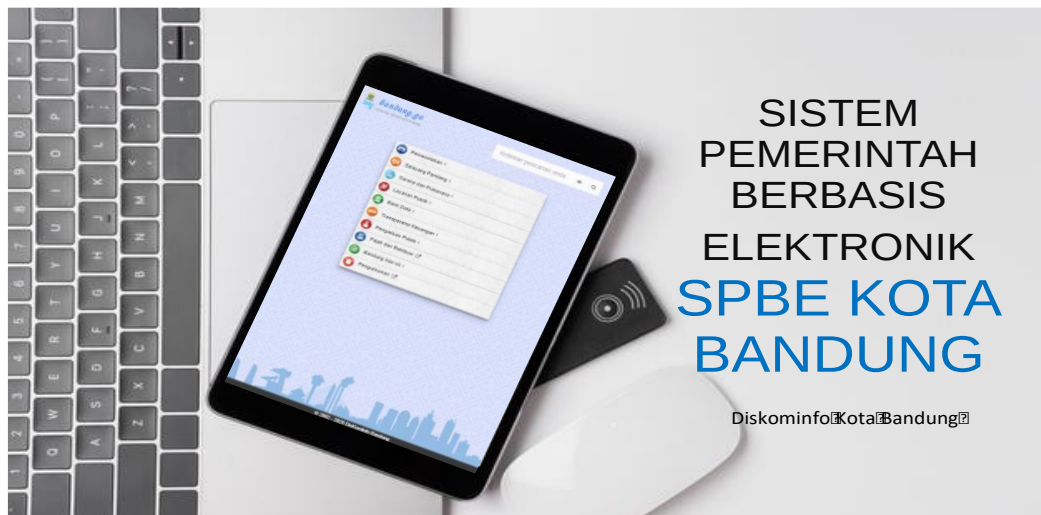
Capaian indikator 1 = Berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian PAN RB RI

Hasil evaluasi dari Kementerian PANRB ini merupakan salah satu pedoman bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan SPBE ke depan untuk lebih baik lagi.

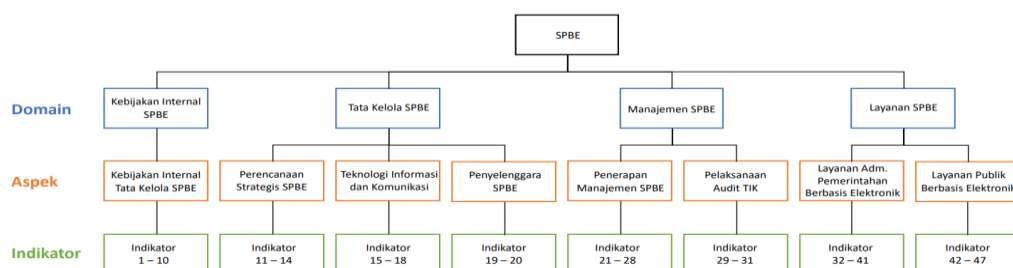
a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pada Tahun 2025, indikator “Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)” memiliki target 4,62 Nilai terealisasi poin 4,66 Nilai atau 100,87%. Dari target tersebut menggambarkan indikator tersebut telah tidak melebihi target yang telah ditentukan.

No	URAIAN	Rencana 2025	Realisasi 2025
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,62 Nilai	4,66 Nilai



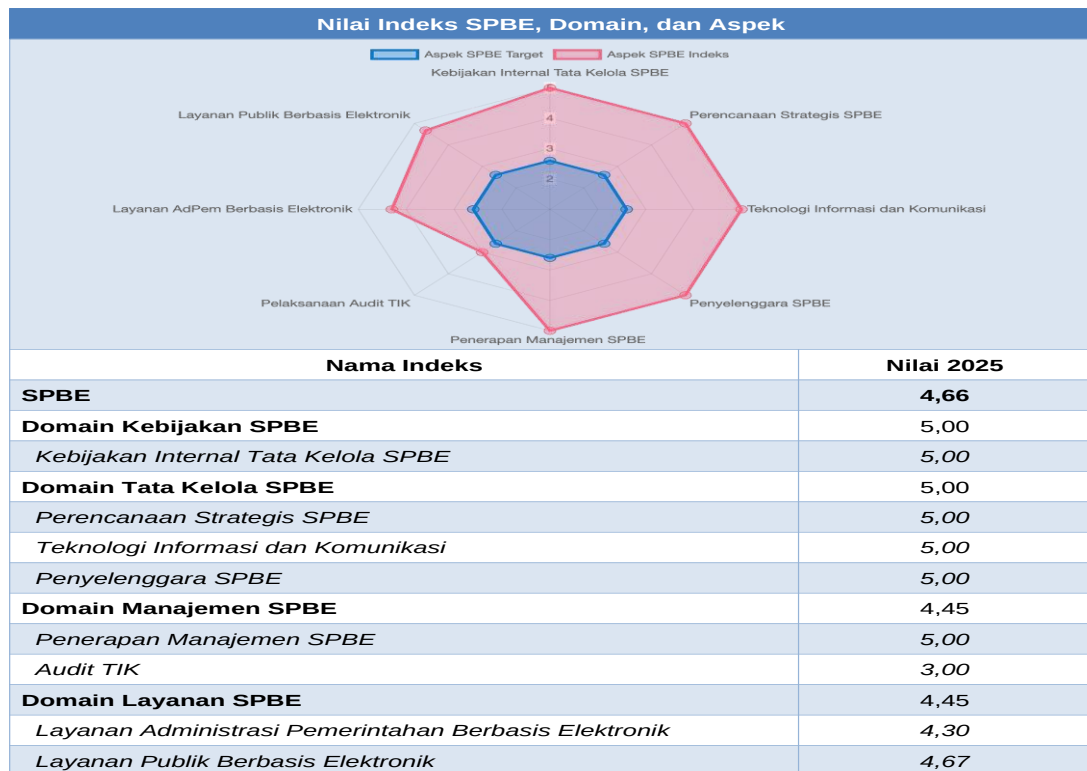
PM PANRB 59/2020 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE.



Gambar 6.
 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kota Bandung
 Tahun 2025

INDEKS SPBE – PEMERINTAH KOTA BANDUNG

4,66
 (Memuaskan)



b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

Realisasi pada Tahun 2025 ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Pada Tahun 2025 memperoleh Nilai terealisasi 4,66 Nilai atau 100,87%, dari target 4,62 Nilai, sebagai gambaran perolehan Tahun 2019 nilai 3,72; Tahun 2020 memperoleh 3,20, Tahun 2021 memperoleh 3,19, Tahun 2022 memperoleh 3,61, Tahun 2023 memperoleh 3,98 dan Tahun 2024 memperoleh 4,59.

No	URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,72 Nilai	3,20 Nilai	3,19 Nilai	3,61 Nilai	3,98 Nilai	4,59 Nilai	4,66 Nilai

c. Realisasi Kinerja dengan Akhir Tahun Berjalan

Kinerja pada Tahun 2025 indikator “Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)” dengan akhir tahun berjalan, pada Tahun 2025 yaitu realisasi sebesar 4,66 Nilai bila dibandingkan dengan target tahun berjalan sebesar 4,62 Nilai atau 100,87%

No	URAIAN	REALISASI TAHUN 2025	AKHIR TAHUN 2025
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,62 Nilai	4,66 Nilai

d. Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional

Kinerja pada indikator “Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)” berdasarkan hasil Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/76/M.PD.06/2025 Tanggal 31 Desember 2025 tentang Penyampaian Hasil Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2025.

Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kota Bandung jauh melebihi standar nasional yang ditentukan yaitu sebesar 3,00 Nilai.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Output dari program/ kegiatan/ anggaran ini adalah upaya untuk meningkatkan level pematangan smart city yang mengkoordinasikan perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Pengguna SPBE adalah semua pemangku kepentingan yang memanfaatkan layanan SPBE, antara lain pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian kinerja pada Tahun 2025 ini diantaranya:

- ❖ Adanya konsep smart city sebagai kebijakan pemerintah pusat
- ❖ Adanya komitmen Pemerintah Kota Bandung dalam peningkatan level kematangan SPBE .
- ❖ Adanya dukungan dari perangkat daerah dalam menggunakan Teknologi Komunikasi dan Informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Faktor yang menghambat pencapaian kinerja diantaranya:

1. Nilai capaian Index SPBE bukan hanya jadi tanggungjawab Diskominfo sehingga dalam indikator penilaiannya perlu melibatkan semua perangkat daerah dan OPD yang bertanggungjawab dalam rencana strategis Kota seperti Bappelitbang, Proses Bisnis di Bagian organisasi, rencana anggaran dengan BKAD dan Tim TAPD, Manajemen Risiko dan Audit dengan Inspektorat, Manajemen SDM

- dan Pengetahuan dengan BKPSDM serta berbagai layanan internal dan Publik di masing-masing Perangkat Daerah.
2. Kebutuhan kecepatan dan spesifikasi internet pada masing-masing OPD belum sesuai dengan kapasitas. Dikarenakan masing-masing OPD memiliki kebutuhan kecepatan internet yang perlu diukur lebih lanjut sesuai dengan penggunaannya
 3. Kurangnya sarana dan prasarana untuk kualitas konten media sosial baik gambar, video maupun audio.
 4. Kurangnya wawasan dari pengelola media sosial, pengelola permohonan informasi publik dan pengelola pengaduan publik di OPD akibat dari pergantian petugas
 5. Kurangnya koordinasi mengenai OPD yang memberikan layanan kegawatdaruratan;
 6. Secara kelembagaan, perlu adanya unit kerja khusus untuk pengembangan sistem informasi.
 7. Integrasi Sistem Informasi dan berbagi pakai data dengan lembaga vertikal masih terkendala di dalam pemanfaatan platform Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) dikarenakan belum semua lembaga vertikal menggunakan layanan SPLP ini.
 8. Untuk internal Kota Bandung, belum semua perangkat daerah memahami dan bisa memanfaatkan layanan SPLP ini dikarenakan SDM kurang .
 9. Implementasi urusan statistik sangat bergantung pada peran aktif dari seluruh perangkat daerah. Sehingga ketika perangkat daerah dengan bobot pekerjaan yang tinggi, menghambat proses pencapaian target urusan statistik.

Dari analisis faktor pendukung dan penghambat, kami memberikan solusi/ rekomendasi, dan tindak lanjut atas faktor penghambat yang mungkin muncul kemudian hari. Solusi/ rekomendasi/ tindak lanjut tersebut adalah:

1. Menerapkan Indikator kinerja SPBE di berbagai Perangkat daerah sehingga target dan capaian dapat menjadi tanggungjawab bersama tidak hanya Diskominfo.
2. Dilakukan asistensi ke masing-masing OPD terhadap kebutuhan layanan internet yang disesuaikan kecepatannya dengan penggunaan, sehingga lebih efisien dan efektif
3. Pengadaan sarana dan prasarana untuk kebutuhan pembuatan konten media sosial sesuai anggaran yang tersedia
4. Bimbingan teknis serta pelatihan untuk pengelola media sosial, pengelola permohonan informasi publik serta pengelola pengaduan publik dari OPD
5. Rapat koordinasi diantara OPD yang memberikan layanan kegawatdaruratan.
6. Membentuk unit kerja khusus yang mengurus pengembangan sistem informasi.
7. Mendorong kementerian Komdigi untuk lebih proaktif mensosialisasikan pemanfaatan SPLP ke lembaga-lembaga vertikal.
8. Mengadakan bimbingan teknis dan pendampingan terhadap perangkat daerah yang kesulitan dalam memanfaatkan layanan SPLP ini sebagai wadah berbagi pakai data dan integrasi Sistem Informasi.
9. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah, salah satunya dengan memberikan apresiasi kepada perangkat daerah yang paling berkontribusi dalam pengelolaan urusan statistik.

f. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

SASARAN 1 “Meningkatnya Penguatan fondasi transformasi tata kelola pemerintahan dan layanan publik dengan indikator Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Selama Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung telah melakukan berbagai efisiensi antara lain;

- ❖ Mengoptimalkan Sumber daya Manusia (SDM) dengan jumlah SDM yang dimiliki sebanyak 77 orang yang dibantu dengan tenaga ahli sesuai dengan bidangnya;
- ❖ Sarana dan prasarana kerja seperti; penggunaan AC, listrik, lampu, computer digunakan pada saat jam kerja selesai langsung dimatikan;
- ❖ Alat tulis kantor digunakan sesuai dengan kebutuhan;
- ❖ Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan operasional dilaksanakan secara rutin;

Capaian kinerja sasaran pertama dari target kinerja nilai 4,62 terealisasi sebesar nilai 4,66 atau 100.87 % sedangkan penunjang pencapaian kinerja dalam penggunaan anggaran sesuai kebutuhan dari pagu yang ada sebesar Rp. 28.015.080.199,- terealisasi sebesar Rp. 27.832.721.196,- atau 99,35%, sasaran ini memiliki tingkat efisiensi 1,52% dan tingkat efektivitasnya yang tinggi yaitu 101,53%, hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

TABEL 3.3

TINGKAT AKUNTABILITAS KEUANGAN

**Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
 Periode 2025 - 2029
 Tahun 2025**

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan				
					Target	Realisasi	(%)		Program	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government	01.01	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Katagori	4,62	04.66	100,87	1	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	16.544.108.536	16.467.250.958	99,54
								2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	880.017910	878.030.901	99.77
								3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	409.024.208	389.123.400	95,13
								4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	10.181.929.545	10.098.315.937	99.18
								RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR				
		Tingkat Efisiensi 1,52% Tingkat Efektifitas 101,53%										

Sumber : e-sakip Dinas Komunikasi dan Informatika

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian

Hasil analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan, dapat dilihat pada Tabel 3.4 di bawah ini;

Tabel. 3.4
Capaian Program Tahun 2025

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kerja	Satuan	2025			
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar							
Urusan Komunikasi dan Informatika							
Dinas Komunikasi dan informatika							
1	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Nilai Penerapan SPBE lingkup Layanan Informasi	Hasil	3.00	3,00	100	Nilai yang diperoleh pada Sub Domain Layanan SPBE, Indikator Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik pada Bidang Diseminasi Informasi dengan memberikan layanan informasi baik sosialisasi melalui media cetak, elektronik, media daring, sosialisasi melalui tatap muka, media sosial, Kegiatan Bandung Menjawab sebanyak 3 episode. Formulasi: Penilaian berdasarkan Keputusan Menpan RB Nomor : B/76/M.PD.06/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Penyampaian Hasil Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2025 Realisasi capaian kinerja diperoleh dari realisasi kinerja dibagi dengan target kinerja pada tahun yang sama Dukungan : Koordinasi dengan Pewartu Balaikota Bandung (PBB), media daring dan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung memudahkan penyampaian informasi/klarifikasi/sosialisasi dan edukasi pada Program Bandung Menjawab menjadi lebih akurat karena

						informasi diperoleh langsung dari OPD terkait. Dalam menjalankan fungsi komunikasi publik, Humas Kota Bandung telah memproduksi 2.158 siaran pers dan 1.169 konten media sosial. Selain itu, kami juga menerapkan layanan keterbukaan informasi publik dan menyebarkan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), diantaranya melalui media elektronik (website PPID), dan media sosial PPID Kota Bandung. Saat ini, permohonan informasi Pemerintah Kota Bandung juga dilakukan secara digital dan satu pintu, yaitu melalui Aplikasi Permohonan Informasi Publik (SIMONIK/ https://ppid-simonik.bandung.go.id/). Hal ini juga diperkuat oleh koordinasi antara Diskominfo selaku PPID Utama dengan 77 PPID Pembantu yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah baik dinas, badan, bagian, kecamatan, BLUD, dan BUMD, serta 346 PPID Sub Pembantu Satker Pendidikan dari tingkat SMP Negeri hingga tingkat SD Negeri di Kota Bandung. Koordinasi yang kuat antar PPID Pembantu, dan PPID Sub Pembantu satker Pendidikan membuat penyelenggaraan pelayanan informasi publik dapat berjalan sesuai SOP, dan setiap tahun melakukan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik, menyiapkan desk layanan informasi di Mall Pelayanan Publik, serta melakukan sosialisasi dan rapat koordinasi tindak lanjut permohonan informasi publik bersama PPID Pembantu dan Sub Pembantu Satker Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Sementara itu dari segi layanan keterbukaan informasi publik melalui PPID telah dilakukan Rapat Koordinasi dan Harmoni PPID Kota Bandung untuk memperkuat kapasitas teknis SDM dalam penggunaan layanan SIMONIK, serta pengembangan Aplikasi Permohonan Informasi Publik (SIMONIK) itu sendiri. Serta sosialisasi keterbukaan informasi publik kepada masyarakat Kota Bandung.
--	--	--	--	--	--	---

							Perlunya dilakukan rapat koordinasi yang melibatkan Kepala OPD dan Kecamatan sebagai tim pertimbangan informasi dan Kepala BLUD dan BUMD sebagai PPID Pembantu untuk mendorong penerapan keterbukaan informasi masing-masing instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Selama Tahun 2025 PPID Kota Bandung telah menerima sebanyak 500 permohonan informasi publik. Segala upaya tersebut berhasil mengantarkan Pemerintah Kota Bandung sebagai badan publik dengan predikat "Informatif" yang ke-11 kalinya oleh Komisi Informasi Jawa Barat. Formulasi: Penilaian berdasarkan Keputusan Menpan RB Nomor 663 Tahun 2024 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 Realisasi capaian kinerja diperoleh dari realisasi kinerja dibagi dengan target kinerja pada tahun yang sama Hambatan : Koordinasi lintas Perangkat Daerah kurang maksimal sehingga kegiatan Bandung Menjawab seringkali tidak sesuai rencana. Kurangnya dukungan pimpinan masing-masing instansi dalam menerapkan keterbukaan informasi publik Solusi : Meningkatkan koordinasi lintas Perangkat Daerah, sehingga kegiatan Bandung Menjawab dapat dilaksanakan sesuai rencana. Mengadakan Rapat Koordinasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik yang melibatkan Kepala OPD dan Kecamatan sebagai tim pertimbangan informasi dan Kepala BLUD dan BUMD sebagai PPID Pembantu
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Radio Sonata	Nilai	88,50	88.56	100	Nilai hasil survei yang disampaikan kepada masyarakat dan narasumber atas pelayanan kinerja UPT. Radio Sonata sebanyak 291 responden selama Tahun 2025 Formulasi : Penilaian berdasarkan Keputusan Menpan RB No 14 Tahun 2017 Tentang Survei Kepuasan Masyarakat. Survei kepada perangkat daerah dan masyarakat terhadap layanan Radio Sonata.

							Realisasi capaian kinerja diperoleh dari realisasi kinerja dibagi dengan target kinerja pada tahun yang sama. Dukungan : Terlaksananya dan ketersediaan data dari para pemanfaatan fasilitas radio dengan menyampaikan informasi data survei Hambatan : Tidak semua narasumber dan masyarakat mengisi survei yang disediakan. Kesulitan menggunakan aplikasi survei. Solusi : Membuat akses yang lebih mudah digunakan dalam perolehan hasil survei
		Nilai layanan informasi masyarakat melalui radio	Hasil	0.4	0.4	100	Nilai yang diperoleh pada Sub Domain Layanan SPBE, Indikator Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik melalui Radio Sonata sebanyak 217 kali talkshow dan 227 kali liputan kegiatan offair selama Tahun 2025. Formulasi: Penilaian berdasarkan Keputusan Menpan RB Nomor : B/76/M.PD.06/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Penyampaian Hasil Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2025 Realisasi capaian kinerja diperoleh dari realisasi kinerja dibagi dengan target kinerja pada tahun yang sama Dukungan : Adanya dukungan dari masyarakat khususnya perangkat daerah, komunitas dan lembaga lainnya dalam upaya memberikan informasi sebagai narasumber kepada masyarakat sesuai dengan fungsinya; Hambatan : Layanan materi informasi masih belum maksimal serta Kehadiran Narasumber Berubah. Solusi : Berupaya untuk melakukan koordinasi dengan perangkat daerah, komunitas dan lembaga lainnya sebagai narasumber
		Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	Nilai	4	4	4	Pelayanan Pengaduan Masyarakat di pusatkan dalam 1 kanal pengaduan melalui aplikasi LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) yang dilakukan secara online melalui https://www.lapor.go.id . Dimana terdapat 229 orang admin yang bertugas menindaklanjuti pengaduan

									(48 admin OPD, 30 admin Kecamatan, 151 admin Kelurahan). Dimana untuk pengelolaan LAPOR pada tahun 2025 terdapat 744 laporan terdiri dari belum ditindaklanjuti 13 laporan, 731 laporan status selesai. Formulasi : Menghitung jumlah laporan yang masuk, sudah di proses dan selesai ditindaklanjuti dan berdasarkan hasil penilaian Reformasi Birokrasi General.. Realisasi capaian kinerja diperoleh dari realisasi kinerja dibagi dengan target kinerja pada tahun yang sama Dukungan : Koordinasi dengan admin LAPOR! pada instansi di Pemerintah Kota Bandung membuat pengaduan masyarakat yang masuk dapat ditangani dengan cepat dan tepat sesuai dengan SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat. Hambatan : Mutasi dan Rotasi pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung membuat sering terjadinya perubah admin yang bertugas menindaklanjuti pengaduan sehingga sering terjadinya keterlambatan dalam menindaklanjuti pengaduan dikarenakan diperlukannya pelatihan kepada admin yang baru. Solusi : Untuk pengelolaan pengaduan diperlukan bimbingan teknis secara rutin kepada para admin yang bertugas menindaklanjuti pengaduan juga diperlukannya sosialisasi secara masif kepada masyarakat baik melalui media sosial, meida cetak, media elektronik, sosialisasi melalui tatap muka, media luar ruang (seperti cetak spanduk, x-banner dan baliho).
2	PROGRAM INFORMATIKA	APLIKASI	Nilai SPBE Aplikasi	Penerapan lingkungan	Nilai	10,00	10,00	100	Nilai yang diperoleh pada Sub Domain Tata Kelola SPBE, Sub Domain Manajemen SPBE, Sub Domain Layanan Internal dan Sub Domain Layanan Publik, yaitu : 1. Membangun/ mengembangkan aplikasi layanan administrasi maupun aplikasi layanan publik sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kebutuhan masyarakat. 2. Mengintegrasikan aplikasi, baik itu aplikasi milik pemerintah kota Bandung, maupun aplikasi milik pemerintah Pusat melalui layanan sistem penghubung layanan pemerintah (SPLP). Formulasi:

							Penilaian berdasarkan Keputusan Menpan RB Nomor : B/76/M.PD.06/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Penyampaian Hasil Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2025 Realisasi capaian kinerja diperoleh dari realisasi kinerja dibagi dengan target kinerja pada tahun yang sama Capaian kinerja untuk sub kegiatan penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah daerah dapat diukur dengan jumlah aplikasi perangkat daerah yang terintegrasi melalui layanan SPLP. Untuk Pengembangan Aplikasi SPBE, capaian kinerja diukur dari sejauh mana pembangunan aplikasi SPBE telah melalui tahapan siklus pembangunan aplikasi SPBE / software development life cycle (SDLC) Pendukung : Regulasi, Manajemen & Tata Kelola yang baik sesuai peraturan yang berlaku, serta dukungan dari pimpinan, SDM dan infrastruktur. Hambatan : 1. Masih adanya regulasi yang harus dioptimalkan untuk mendukung implementasi aplikasi layanan publik maupun layanan Administrasi 2. Tingkat kepatuhan Perangkat Daerah terhadap peraturan yang berlaku perlu ditingkatkan. 3. Dukungan dari Perangkat Daerah perlu ditingkatkan. 4. Pemanfaatan layanan SPLP belum maksimal ditingkat perangkat daerah karena kurangnya tenaga teknis. Solusi : 1. Menyusun draft peraturan perundangan 2. Melaksanakan sosialisasi dan edukasi. 3. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah. 4. peningkatan kapasitas dan pemahaman ditingkat perangkat daerah dalam mengelola pemanfaatan SPLP.
		Nilai Penerapan SPBE lingkup	Nilai	16.20	16.70	103,09%	Nilai yang diperoleh pada Penerapan SPBE lingkup Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan

		Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan					1. Telah Dilakukan Update Arsitektur dan Peta Rencana SPBE 2025-2030 2. Telah diterbitkan Kebijakan Manajemen SPBE 3. Telah di updatenya Tim Koordinasi dan Kolaborasi SPBE 4. Terselenggaranya Clearance Anggaran SPBE 2025 Formulasi: Penilaian berdasarkan Keputusan Menpan RB Nomor : B/76/M.PD.06/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Penyampaian Hasil Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2025 Realisasi capaian kinerja diperoleh dari realisasi kinerja dibagi dengan target kinerja pada tahun yang sama. Dukungan : Kebijakan Berupa Peraturan Walikota tentang Kebijakan Internal SPBE , Arsitektur, Peta rencana dan manajemen Hambatan : 1. Keterbatasan Anggaran Kegiatan 2. Keterbatasan waktu dan sumber daya manusia untuk memenuhi semua tingkat manajemen SPBE 3. Fokus ber alih ke Pemerintah Digital Solusi : 1. Pemenuhan Anggaran kegiatan untuk mendukung Kebijakan, tata kelola dan manajemen SPBE 2. Memulai persiapan lebih awal terkait koordinasi dan konsolidasi penyusunan kebijakan internal SPBE, Tatakelola dan Manajemen SPBE 3. Menambah jumlah SDM untuk manajemen SPBE 4. Meningkatkan pemahaman terkait Pemerintah Digital
		Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan	Nilai	3.04	3.04	100%	Arsitektur SPBE telah disusun dan di input melalui aplikasi SIA arsitektur V3 dengan memenuhi Level 3 berupa As-is, Tobe dan Peta rencana Arsitektur SPBE.

		Berbasis Elektronik					
		Nilai Penerapan SPBE lingkup Infrastruktur	Nilai	10	10	100%	Nilai yang diperoleh pada Sub Domain Manajemen SPBE dan Sub Domain Layanan SPBE dengan memberikan layanan bandwidth sebanyak 800 Mbps dengan alokasi layanan mencakup operasional Diskominfo, layanan server. Server yang terpusat di Diskominfo dengan jaringan intra pemerintah kota Bandung, yang telah terintegrasi dengan Pusat Data Nasional (Kemenkominfo) dan Provinsi Jawa Barat. 172 titik tiang CCTV yang juga telah terintegrasi dengan CCTV Polres Kota Bandung, Polda Jawa barat dan Pemerintah Provinsi Jawa barat. Formulasi: Penilaian berdasarkan Keputusan Menpan RB Nomor : B/76/M.PD.06/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Penyampaian Hasil Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2025 Realisasi capaian kinerja diperoleh dari realisasi kinerja dibagi dengan target kinerja pada tahun yang sama. Hambatan : 1. Berkurangnya alokasi layanan bandwidth OPD sehingga layanan Jaringan Intra Pemerintah (JIP) kota Bandung berjalan kurang optimal. 2. Sumber daya TIK (storage server, processor, memori) yang tersedia semakin sedikit sedangkan kebutuhan akan pengembangan aplikasi semakin besar. 3. Perangkat pendukung keamanan sistem informasi yang belum memadai untuk mendeteksi dan melindungi server dan aplikasi dari serangan siber. Solusi : Melakukan peningkatan kapasitas bandwidth untuk akses internet perangkat daerah dalam rangka optimalisasi manajemen dan monitoring bandwidth perangkat daerah serta Jaringan Intra Pemerintah (JIP) kota Bandung. Tersusunnya dokumen Manajemen Aset TIK yang lengkap dan terstruktur setiap tahun serta memonitor jalannya sistem proteksi server melalui perangkat firewall. Dalam memenuhi kebutuhan sumber daya TIK server (storage, processor,

							memori), tetap memanfaatkan fasilitas Pusat Data Nasional dari Kemenkominfo, server cloud dari Diskominfo Provinsi Jawa Barat, serta pengajuan anggaran dan pengadaan server hyperconverged (HCI) sebagai sumber daya server utama dan jangka panjang .
--	--	--	--	--	--	--	---

Urusan Statistik

Dinas Komunikasi dan informatika

1	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Nilai Penerapan SPBE lingkup Data dan Statistik	Nilai	5.8	5.8	100	Penerapan SPBE lingkup Data dan Statistik terdiri dari 2 komponen, yaitu Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data dan Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka, pada indikator SPBE. Untuk nilai keseluruhan, setelah dilakukan pembobotan, diperoleh hasil penilaian mandiri untuk penerapan SPBE lingkup Data dan Statistik sebesar 5,80. Formulasi Penilaian berdasarkan Keputusan Menpan RB Nomor : B/76/M.PD.06/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Penyampaian Hasil Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2025 pada Sub Domain Layanan SPBE, yaitu rata-rata dan pembobotan dari Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data dan Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka, yaitu 5,80 Hambatan : Telah dilakukan beberapa langkah dalam peningkatan manajemen data dan layanan data diantaranya dengan pengembangan aplikasi Pengelolaan Data Terstandar dan Terintegrasi (SIPEDASI) dan pelaksanaan Bimbingan teknis bagi para pengelola data. Namun berdasarkan hasil evaluasi, keterbatasan sumber daya di Perangkat Daerah mengakibatkan tumpang tindihnya beban kerja sehingga mempengaruhi proses penyelesaian pelaksanaan kegiatan.
---	--	--	-------	-----	-----	-----	--

							Solusi : Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya pada Perangkat Daerah. Faktor Pendorong Penilaian Indeks Pembangunan Statistik oleh BPS Penilaian Satu Data Indonesia oleh Bappenas Penilaian SPBE oleh Kemenpan RB.
--	--	--	--	--	--	--	---

Urusan Persandian

Dinas Komunikasi dan informatika

1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Nilai Penerapan SPBE lingkup Persandian	Nilai	3.7	3.7	100 %	Nilai Indeks yang diperoleh pada Sub Domain Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi dan Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE. Pada Tahun 2025 telah dilaksanakan proses Surveillance ISO 27001 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi, kegiatan tersebut mendukung dari penerapan Manajemen Keamanan Informasi. Sedangkan untuk Audit Keamanan SPBE telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman dan Tata Cara Audit Keamanan dari BSSN yang baru disahkan pada akhir tahun 2024. Formulasi : Penilaian berdasarkan Keputusan Menpan RB Nomor : B/76/M.PD.06/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Penyampaian Hasil Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2025 Nilai % capaian kinerja diperoleh dari nilai realisasi pada tahun yang bersangkutan dibagi dengan target pada tahun yang sama dikali 100%
---	---	---	-------	-----	-----	-------	--

							Pendukung : 1. Telah diraihnya sertifikasi dan surveillance ISO 27001 terkait implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi; 2. Telah dilakukan audit keamanan SPBE; 3. Terjalannya kerjasama dan koordinasi yang baik dengan Diskominfo Provinsi Jawa Barat, BSSN. 4. Meningkatkan perlindungan data dengan implementasi Sandi Data dan integrasi modul TTE oleh BSSN.
--	--	--	--	--	--	--	---

Sumber : LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika_2025

Tebel. 3.5
Realisasi Program/Kegiatan Sasaran 1 Tahun 2025

2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Nilai Penerapan SPBE lingkup Layanan Informasi	3,0	3,0
		Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	4	4
		Nilai layanan informasi masyarakat melalui radio	0,4	0,4
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Radio Sonata	88,50	88,56
2.16.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Keterbukaan Informasi Publik	92 Persentase	92 Persentase
2.16.02.2.01.014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	4 Laporan	4 Laporan
2.16.02.2.01.015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	1 Komunitas	1 Komunitas
2.16.02.2.01.017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	5 permohonan	5 permohonan

2.16.02.2.01.019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi
2.16.02.2.01.021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	1 media	1 media
2.16.02.2.01.022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	10 dokumen	10 dokumen
2.16.02.2.01.023	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	12 konten	12 konten
2.16.02.2.01.024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	300 orang	300 orang
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Nilai Penerapan SPBE lingkup Aplikasi	10,00	10,00
		Nilai Penerapan SPBE lingkup Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan	16,20	16,70
		Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,00	3,00
		Nilai Penerapan SPBE lingkup Infrastruktur	10,00	10,00
2.16.03.2.02	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	4 Aplikasi	4 Aplikasi
		Cakupan leveling Pemerintahan Digital	1 Level	1 Level
		Persentase keterhubungan layanan internet Perangkat Daerah	100%	100%
2.16.03.2.02.013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	35 Aplikasi	35 Aplikasi
2.16.03.2.02.018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	2 Dokumen	2 Dokumen
2.16.03.2.02.019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 dokumen	1 dokumen
2.16.03.2.02.020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	5 Aplikasi	5 Aplikasi

	rencana SPBE pemerintah daerah			
2.16.03.2.02.021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	4 aplikasi	4 aplikasi
2.16.03.2.02.023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	2 kegiatan	2 kegiatan
2.16.03.2.02.024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	200 PD	200 PD
2.16.03.2.02.030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	200 PD	200 PD
2,2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Nilai Penerapan SPBE lingkup Data dan Statistik	5,80	5,80
		Indeks Pembangunan Statistik	3,04	3,04
2.20.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan data sektoral yang tersedia pada Portal Data sesuai dengan standar data	100%	100%
2.20.02.2.01.008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100%	100%
2.20.02.2.01.009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100%	100%
2.20.02.2.01.010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 dokumen	1 dokumen
2,21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			

2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Nilai Penerapan SPBE lingkup Persandian	3,70	3,70
2.21.02.20.1	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang terkendali keamanannya	7 Aplikasi	7 Aplikasi
2.21.02.20.1.004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	7 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah

Sumber : LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika_2024

Sasaran 2: Indeks Kepuasan Masyarakat.

Penjelasan umum sasaran dan indikator

Pelayanan publik dapat diartikan pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan kepada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Selanjutnya menurut Permen PANRB No.14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat (Sinambela, 2010, hal : 5). Jika kenyataan lebih dari yang diharapkan, maka layanan dapat dikatakan bermutu sedangkan jika kenyataan kurang dari yang diharapkan, maka layanan dikatakan tidak bermutu, dan apabila kenyataan sama dengan harapan, maka layanan disebut memuaskan (Lupiyoadi, 2001, hal: 148).

Dalam kenyataannya pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan, sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga

menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparaturnya pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Dalam upaya memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat, diperlukan Reformasi Pelayanan Publik, (Sinambela, 2010, hal : 5) menyatakan bahwa pelayanan publik dapat diartikan, pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan peraturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan itu diperlukan penilaian mandiri (self assesment) yang sesuai dengan dengan Permenpan nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dimana salah satu sasaran dari keberhasilan reformasi birokrasi adalah terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Pada sasaran Kedua yang dicapai pada Tahun 2025 ini, Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Diskominfo dengan Indeks Kepuasan Masyarakat, dapat dilihat pada Tabel 3.6 di bawah ini;

TABEL. 3.6
ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024		%	TAHUN 2025		%	TAHUN 2026	TAHUN 2029
		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		TARGET RPJMD	TARGET AKHIR RPJMD
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,40	95,89	108,47	95,90	96,05	100,16	95,91	95,94

Instrumen/ cara perhitungan indikator

Pengukuran capaian indikator 2 dilakukan dengan melihat data total jumlah responden masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung . Adapun layanan yang diberikan mulai dari ;

1. Persyaratan Pelayanan yang Diberikan Sudah Sesuai

- 2 Prosedur Pelayanan yang Diberikan Mudah
- 3 Waktu Pelayanan yang Diberikan Tepat Sesuai SOP
- 4 Produk Layanan Sesuai dengan yang Diminta
- 5 Kemampuan Petugas dalam Memberikan Pelayanan Memadai
- 6 Pelayanan yang Telah Diberikan Memuaskan
- 7 Petugas yang Memberikan Pelayanan Ramah
- 8 Produk Layanan yang Dijanjikan Diberikan Tepat Waktu
- 9 Tindak Lanjut Pengaduan/Layanan Memuaskan

Dengan menggunakan formulasi perhitungan:

Capaian indikator 2

= Berdasarkan hasil survai pelayanan Diskominfo terhadap masyarakat

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

Pada Tahun 2025, indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat” dari target 95,90 Nilai terealisasi sebesar 96,05 Nilai atau 100,16% (melebihi target yang telah ditentukan).

No	URAIAN	Rencana 2024	Realisasi 2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	95,90 poin	96,05 poin

GAMBAR 7

LAPORAN HASIL SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

LAPORAN HASIL SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
PADA PERANGKAT DAERAH : DINA6 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BANDUNG
2025

1. Indeks Per Unsur Pelayanan

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah nilai pada unit pelayanan diperoleh jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata daü setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,11, sebagai berikut:

No.	UN6UR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN (NRR)
1	Persyaratan	(U1) 3.819
2	Sistem,Mekanisme,dan Prosedur	(U2) 3.759
3	Waktu Penyelesaian	(U3) 3.747
4	Biaya/Tarif	(U4) 4.000
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	(U5) 3.675
6	Kompetensi Pelaksana	(U6) 3.783
7	Perilaku Pelaksana	(U7) 3.976
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	(U8) 4.000
9	Sarana dan Prasarana	(U9) 3.831
10	Nilai Unsur Tertinggi	4.000
11	Nilai Unsur Terendah	3.675

Keterangan : Jumlah Responden sebanyak : 83 orang

Maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$(NRR\ U1 \times 0,11) + (NRR\ U2 \times 0,11) + (NRR\ U3 \times 0,11) + (NRR\ U4 \times 0,11) + (NRR\ U5 \times 0,11) + (NRR\ U6 \times 0,11) + (NRR\ U7 \times 0,11) + (NRR\ U8 \times 0,11) + (NRR\ U9 \times 0,11) = 3.842$$

Dengan demikian nilai indeks unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Nilai IKM setelah dikonversi = 96.05
- Mutu Pelayanan = A
- Kinerja unit pelayanan adalah Sangat baik

2. Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan

Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan.

- Nilai dalam kelompok paling rendah yang harus ditingkatkan yaitu pada unsur pelayanan sebagai berikut : US, U3
- Nilai dalam kelompok paling tinggi yang harus tetap dipertahankan yaitu pada unsur pelayanan sebagai berikut : U4, U8, U7
- Upaya untuk meningkatkan unsur pelayanan :
- Upaya untuk mempertahankan unsur pelayanan

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

(YAYAN AHMAD BRILYANA, S.Sos.M.Si)
 Pembina Utama Muda/IV.c
 NIP. 197311271993031003

Bandung, 6 Januari 2026
 Penanggung Jawab

M. RIWAN PATHOMY

Lampiran

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT																			
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																			
Kota Bandung																			
SEMESTER : 2 - TAHUN : 2025 - TRIWULAN : 4																			
NILAI IKM 96.05	<table><thead><tr><th colspan="2">RESPONDEN</th></tr></thead><tbody><tr><td>Jumlah</td><td>. 83</td></tr><tr><td>Jenis Kelamin Pekerjaan</td><td>: 56 29 Orang / P = 54 Orang</td></tr><tr><td></td><td>SMP = 0</td></tr><tr><td></td><td>SMA = 6</td></tr><tr><td></td><td>DJ/D2/D3 = 0</td></tr><tr><td></td><td>S1 = 16</td></tr><tr><td></td><td>S2 = 16</td></tr><tr><td>Survei Periode</td><td>. 202S</td></tr></tbody></table>	RESPONDEN		Jumlah	. 83	Jenis Kelamin Pekerjaan	: 56 29 Orang / P = 54 Orang		SMP = 0		SMA = 6		DJ/D2/D3 = 0		S1 = 16		S2 = 16	Survei Periode	. 202S
RESPONDEN																			
Jumlah	. 83																		
Jenis Kelamin Pekerjaan	: 56 29 Orang / P = 54 Orang																		
	SMP = 0																		
	SMA = 6																		
	DJ/D2/D3 = 0																		
	S1 = 16																		
	S2 = 16																		
Survei Periode	. 202S																		
TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT																			

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

Capaian kinerja pada Tahun 2025 ketika dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2024 yaitu pada Tahun 2025 berdasarkan hasil survai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) memperoleh sebesar 96,05 Nilai, bila dibanding kan Tahun 2024 terealisasi 95,89 Nilai, Tahun 2023 terealisasi 90,92 Nilai, Tahun 2022 terealisasi 85,53 Nilai, Tahun 2021 memperoleh 85,19, Tahun 2020 memperoleh 84,72, dan Tahun 2019 memperoleh 79,94.

Melihat dari data tersebut di atas menunjukan bahwa kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dalam memberikan layanan kepada masyarakat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yaitu mulai dari tingkatan awal cukup, baik dan terakhir sangat baik. Hal ni dapat di lihat pada tabel di bawah ini;

No	URAIAN	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,94 Nilai	84,72 Nilai	85,19 Nilai	85,53 Nilai	90,92 Nilai	95,89 Nilai	96,05 Nilai

c. Realisasi Kinerja dengan Akhir Tahun Berjalan

Capaian kinerja Tahun 2025 ketika dibandingkan dengan capaian kinerja akhir tahun berjalan Tahun 2025 yaitu sebesar 96,05 Nilai bila disandingkan dengan target tahun berjalan yaitu sebesar 95,90 Nilai atau 100,16%.

No	URAIAN	Realisasi 2025	Akhir Tahun 2025
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	96,05 Nilai	95,90 Nilai

d. Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional

Kinerja pada indikator per triwulan yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat” dengan kinerja instansi lainnya, bila dibandingkan dengan perangkat daerah khususnya dengan Sekretariat, Badan dan Dinas di luar perangkat daerah kecamatan. Dinas Komunikasi dan Informatika pada semester 2 Tahun 2025 memperoleh 96,05 Nilai (A) dibandingkan standar nasional belum ada data yang disandingkan.

e. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Output dari indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat” ini adalah: Hasil survai berdasarkan pertanyaan kepada masyarakat atas pelayanan Dalam mencapai sasaran program/kegiatan tersebut, Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran, ada beberapa faktor yang mendukung pencapaian kinerja indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat” pada Tahun 2025 ini, yaitu;

- i. Dukungan dari tim survai Indeks Kepuasan Masyarakat yang terpadu;
- ii. Adanya data survai dari masyarakat melalui web diskominfo dan isian yang disediakan oleh masyarakat yang memerlukan pelayanan diskominfo;
- iii. Adanya dukungan IT yang mumpuni dalam pelaksanaan survai dan kelancaran dalam pelaksanaan survai.

Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja sasaran

Faktor yang menghambat pencapaian kinerja indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat ” pada Tahun 2025, faktor penghambat dalam pelaksanaan survai yaitu; Pemahaman masyarakat dalam produk pelayanan Diskominfo khususnya kewenangan antara pusat dan daerah;

Solusi/rekomendasi/tindak lanjut untuk pencapaian kinerja sasaran

Dari analisis faktor pendukung dan penghambat, kami dapat memberikan solusi/ rekomendasi, dan tindak lanjut atas faktor penghambat

yang mungkin muncul kemudian hari, yaitu memberikan pemahaman tugas dan pokok diskominfo sesuai dengan peraturan yang ada, karena kewenangan pusat seperti; pelayanan untuk memblokir situs yang bersifat negatif.

Pemahaman kepada masyarakat itu ditindaklanjuti dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan menggunakan internet bersifat bijak kepada sekolah-sekolah maupun kepada orang tua murid untuk selalu mengawasi anak-anaknya dalam melakukan kegiatan browsing di internet.

f. Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya

SASARAN 2 “Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Diskominfo dengan Indeks Kepuasan Masyarakat, Selama Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung telah melakukan berbagai efesiensi antara lain;

- Mengoptimalkan Sumber daya Manusia (SDM) dengan jumlah SDM yang dimiliki sebanyak 77 orang yang dibantu dengan tenaga ahli sesuai dengan bidangnya;
- Sarana dan prasarana kerja seperti; penggunaan AC, listrik, lampu, computer digunakan pada saat jam kerja selesai langsung dimatikan;
- Alat tulis kantor digunakan sesuai dengan kebutuhan;
- Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan operasional dilaksanakan secara rutin;

Capaian kinerja sasaran kedua dari target kinerja 95,90 Nilai terealisasi sebesar 96,05 Nilai atau 100,16 % sedangkan penunjang pencapaian kinerja dalam penggunaan anggaran sesuai kebutuhan dari pagu yang ada sebesar Rp. 24.399.695.476,- terealisasi sebesar Rp. 23.312.852.687,- atau 95,78%, tingkat efesiensi 4,61% dan tingkat efektifitas yang tinggi yaitu ; 104,83%, hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

TABEL 3.7

TINGKAT AKUNTABILITAS KEUANGAN

Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Periode 2024 - 2026

Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan			
					Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
2	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Diskominfo	02.01	Indeks Kepuasan Masyarakat PD	Nilai	95,90	96,90	100,16	5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.399.695,476	23.312.852.687	95,55
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR					100,16	TOTAL PER SASARAN	24.399.695,476	23.312.852.687	95,55
		Tingkat Efisiensi 4,51 % Tingkat Efektifitas 104,83%									

Sumber : e-sakip Dinas Komunikasi dan Informatika

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berdasarkan hasil Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2025, dapat dilihat pada Tabel di bawah ini;

Tabel. 3.8

Capaian Program Tahun 2025

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Program	Indikator Kerja	Satuan	2025			
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Keterangan
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar							
Urusan Komunikasi dan Informatika							
Dinas Komunikasi dan informatika							
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Prosentase Pelayanan	Persen	100	100	100%	Persentase dukungan kinerja layanan sarana dan prasarana kinerja Dinas Komunikasi dan

DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Perkantoran						Informatika untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Diskominfo. Formulasi : layanan kinerja : Kebutuhan layanan x 100%. Realisasi capaian kinerja diperoleh dari realisasi kinerja dibagi dengan target kinerja pada tahun yang sama Pendukung : Tersedianya SDM dan peralatan yang memadai. Hambatan : Masih adanya keterbatasan ruangan untuk pelayanan khususnya kepada masyarakat. Solusi : Memanfaatkan ruangan yang ada dan melakukan penataan sesuai dengan kebutuhan.
--------------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

Sumber : LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika_2025

Tabel. 3.9

Realisasi Kinerja Kegiatan Sasaran 2 Diskominfo Tahun 2025

Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Outcome / Output	Target Outcome / Output	Realisasi Outcome / Output
1	2	6	7	8
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peresentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%
2.16.01.2.0 2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan	100%	100%
2.16.01.2.0 2.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77 orang	77 orang
2.16.01.2.0 6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%
2.16.01.2.0 6.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	3 Paket

2.16.01.2.0 6.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket
2.16.01.2.0 6.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket
2.16.01.2.0 6.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen
2.16.01.2.0 6.08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitas kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan
2.16.01.2.0 6.09	Sub Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan
2.16.01.2.0 8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%
2.16.01.2.0 8.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan
2.16.01.2.0 8.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan
2.16.01.2.0 9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%
2.16.01.2.0 9.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	29 Unit	29 Unit
2.16.01.2.0 9.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	204 Unit	204 Unit

Sumber : LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika_2025

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dalam menunjang program kegiatan yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2025, dari 3 urusan yang diampu yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika; Urusan Statistik dan Urusan Persandian dapat dilihat pada Tabel di bawah ini;

Tabel 3.10
 Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025

Kode Rekening	Urusan/Bidang/Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	52.414.775.675,00	51.145.573.883,00	97,58%
2,16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	51.125.733.557,00	49.878.419.582,00	97,56%
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.399.695.476	23.312.852.687	95,78%
2.16.01.2.0 2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.022.187.997	19.114.410.340	95,55%
2.16.01.2.0 2.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.022.187.997	19.114.410.340	95,47
2.16.01.2.0 6	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.090.037.956	1.057.880.924	97,05
2.16.01.2.0 6.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	280.658.565	263.320.000	93,82
2.16.01.2.0 6.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah tangga	76.011.788	72.839.450	95,83
2.16.01.2.0 6.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.653.154	20.050.000	97,08
2.16.01.2.0 6.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	126.108.960	126.108.960	100,00
2.16.01.2.0 6.08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	453.974.489	443.071.400	97,60
2.16.01.2.0 6.09	Sub Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	132.631.000	132.491.114	99,89
2.16.01.2.0 8	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.167.490.923	2.150.298.723	99,21
2.16.01.2.0 8.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.100.000	30.793.227	68,28

2.16.01.2.0 8.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.122.390.923	2.119.505.496	99,86
2.16.01.2.0 9	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.119.978.600	990.262.700	88,42
2.16.01.2.0 9.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.000.299.600	874.641.700	87,44
2.16.01.2.0 9.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	119.679.000	115.621.000	96,61
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	10.181.929.545	10.098.315.937	99,18
2.16.02.2.0 1	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	10.181.929.545	10.098.315.937	99,18
2.16.02.2.0 1.014	Relasi Media	5.236.079.190	5.229.214.590	99,87
2.16.02.2.0 1.015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	258.998.000	243.743.840	94,11
2.16.02.2.0 1.017	Pelayanan Informasi Publik	1.036.256.750	1.018.470.300	98,28
2.16.02.2.0 1.019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	602.669.097	596.766.461	99,02
2.16.02.2.0 1.021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.254.720.900	1.244.061.745	99,15
2.16.02.2.0 1.022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	1.086.000.000	1.081.000.000	99,54
2.16.02.2.0 1.023	Penyusunan Konten	311.200.000	295.021.501	94,80
2.16.02.2.0 1.024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	396.005.608	390.037.500	98,49
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	16.544.108.536	16.467.250.958	99,54
2.16.03.2.0 2	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16.544.108.536	16.467.250.958	99,54
2.16.03.2.0 2.013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	7.649.634.779	7.615.221.484	99,55

2.16.03.2.0 2.018	Koordinasi penyusunan dan/atau reuiu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	478.596.207	478.352.090	99,95
2.16.03.2.0 2.019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	476.503.600	472.694.780	99,20
2.16.03.2.0 2.020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	1.164.632.900	1.136.312.740	97,57
2.16.03.2.0 2.021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	268.756.806	268.501.200	99,90
2.16.03.2.0 2.023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	510.420.730	509.667.280	99,85
2.16.03.2.0 2.024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	520.566.032	516.386.568	99,20
2.16.03.2.0 2.030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	5.474.997.482	5.470.114.816	99,91
2,2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	880.017.910	878.030.901	99,77%
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	880.017.910	878.030.901	99,77
2.20.02.2.0 1	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	880.017.910	878.030.901	99,77
2.20.02.2.0 1.008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	232.777.600	232.179.300	99,74
2.20.02.2.0 1.009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	436.266.650	435.076.201	99,73
2.20.02.2.0 1.010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	210.973.660	210.775.400	99,91
2,21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	409.024.208	389.123.400	95,13%
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	409.024.208	389.123.400	95,13

2.21.02.20.1	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	409.024.208	389.123.400	95,13
2.21.02.20.1.004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	409.024.208	389.123.400	95,13

Sumber : LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika_2025

PERBANDINGAN KINERJA TAHUN 2024 DAN TAHUN 2025

Perbandingan kinerja dilakukan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan dan mengoptimalkan perencanaan dan pelaksanaan kinerja kedepannya. Perbandingan kinerja Tahun 2024 terhadap target Tahun 2025. Perbandingan dilakukan dengan membandingkan baik capaian kinerja maupun presentase kinerja.

1. Perbandingan Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

Perbandingan kinerja dapat dilihat pada Tabel 3.11. Sedangkan perbandingan persentase kinerja dapat di lihat pada Tabel 3.12 di bawah ini;

TABEL 3.11

PERBANDINGAN TARGET DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024, DAN PER TRIWULAN TAHUN 2025

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian									
			2024		2025							
					TW1		TW2		TW3		TW4	
			T	C	T	C	T	C	T	C	T	C
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	3,50	4,59 (Kemenpan)	3,70	4,77 (Mandiri)	3,70	4,77 (Mandiri)	3,70	4,77 (Mandiri)	4,62	4,66 (Kemenpan)
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	88,40	95,89	-	-	88,50	96,65	-	-	95,90	96,05

Keterangan:

T: Target C: Capaian

TABEL 3.12

PERBANDINGAN PERSENTASE CAPAIAN KINERJA, TAHUN 2024, DAN PER TRIWULAN TAHUN 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian				
			2024	2025			
				TW1	TW2	TW3	TW4
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	131,15%	128,92%	128,92%	128,92%	100,87%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	108,48%	--	109,21%	-	100,16%

Di Tabel 3.12, kita dapat melihat peta capaian kinerja Tahun 2025. Pada Tahun 2025 terlihat beberapa indikator sasaran berwarna biru menunjukkan capaian yang melebihi target yang didefinisikan di Renstra Diskominfo 2025-2029.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra 2025-2029

Untuk melihat kondisi akhir capaian kinerja terhadap target Renstra 2025-2029, maka data capaian dan presentase kinerja pada Tahun 2025 perlu dibandingkan dengan Renstra 2024-2026. Hal ini untuk melihat secara rasional pencapaiannya Renstra, dan juga untuk menentukan rencana aksi, baik untuk pencapaian target Renstra, maupun untuk evaluasi kinerja Diskominfo Kota Bandung secara keseluruhan, terutama indikator-indikator sasaran yang termasuk kedalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan *core business* dari PD, dalam hal ini, Diskominfo Kota Bandung. Untuk Tahun 2025 IKU Diskominfo sesuai dengan Renstra Diskominfo Tahun 2025-2029.

TABEL 3.13

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET RENSTRA 2025-2029 DAN REALISASI TAHUN 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capai Akhir Renstra (2025-2029)	Capaian Kinerja					Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai	4,72	4,66	-	-	-	-	

	Elektronik /SPBE								
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	95,94	96,05	-	-	-	-	

TABEL 3.14

PERBANDINGAN PERSENTASE CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET RENSTRA 2024-2026 DAN REALISASI TAHUN 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capai Akhir Renstra (2025-2029)	Prosentase Capaian Kinerja					Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik /SPBE	Nilai	4,72	98,73%	-	-			
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	95,94	100,12%	-	-			

Dari Tabel 3.13 dan Tabel 3.14 terlihat bahwa realisasi indikator pada tahun 2025 bila dibandingkan dengan target capaian akhir renstra Tahun 2029. Indikator 1, poin pada Tahun 2025 dari target sebesar 4,62 terealisasi penilaian sebesar 4,66 atau 98,73 % (memuaskan) 2; realisasi kinerja pada Tahun 2025 sebesar 96,05 Nilai atau 100,12% bila dibandingkan dengan akhir RPJMD Tahun 2025-2029.

PENILAIAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) KOTA BANDUNG

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya, seluruh rangkaian agenda Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2025 telah selesai dilaksanakan. Pelaksanaan pemantauan ini merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dalam mendukung target Program Prioritas Pemerintah Digital pada Peraturan Presiden 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025-2029 yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan tujuan utama mengukur kemajuan serta meningkatkan kualitas penerapan layanan digital pemerintah baik di Instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Besar harapan kami bahwa hasil pemantauan tahun 2025 ini menjadi gambaran nyata atas progres transformasi digital instansi, sekaligus menjadi panduan strategis dalam menyelaraskan penerapan pemerintah digital dengan kebijakan nasional. Semangat keterpaduan ini diharapkan mampu mewujudkan layanan digital yang berkualitas, terintegrasi, dan berdaya guna, sehingga memberikan manfaat konkret bagi pelaksanaan tugas pemerintahan maupun bagi masyarakat luas.

Ke depan, sejalan dengan arah kebijakan nasional yang semakin dinamis, cakupan pemantauan ini akan bertransformasi dari Indeks SPBE menjadi Indeks Pemerintah Digital (Indeks Pemdigi). Perubahan ini menandakan pergeseran fokus dari sekadar digitalisasi proses bisnis menuju ekosistem digital yang lebih holistik dan berorientasi pada pengguna. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh pimpinan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk segera melakukan penyesuaian target indeks serta memperkuat komitmen kepemimpinan dalam menyongsong Indonesia Emas, demi percepatan transformasi digital yang berkelanjutan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, Tim Koordinasi SPBE Nasional, serta Tim Asesor Eksternal dari Perguruan Tinggi atas sinergi dan dedikasinya. Semoga kolaborasi yang telah terjalin baik ini terus meningkat demi kemajuan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik di Indonesia.

Jakarta, 6 Januari 2025



Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

PEMANTUAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
TAHUN 2025

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan SPBE. Pada tahun 2025, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2024

Hasil pelaksanaan pemantauan SPBE yang dilakukan pada tahun 2025 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Pemantauan SPBE ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menentukan arah tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada masyarakat dan terwujudnya Pemerintah Digital dalam kerangka Transformasi Digital Pemerintah.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Pemantauan SPBE

Penerapan SPBE diukur dengan model tingkat kematangan SPBE, di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan, di mana semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menunjukkan semakin tinggi kapabilitas Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut.

Penilaian Pemantauan SPBE didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Penilaian Mandiri dan Penilaian Dokumen.

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas



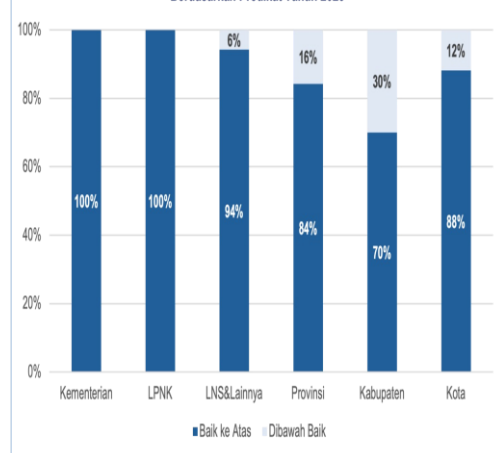
Tingkat Kematangan pada Kapabilitas

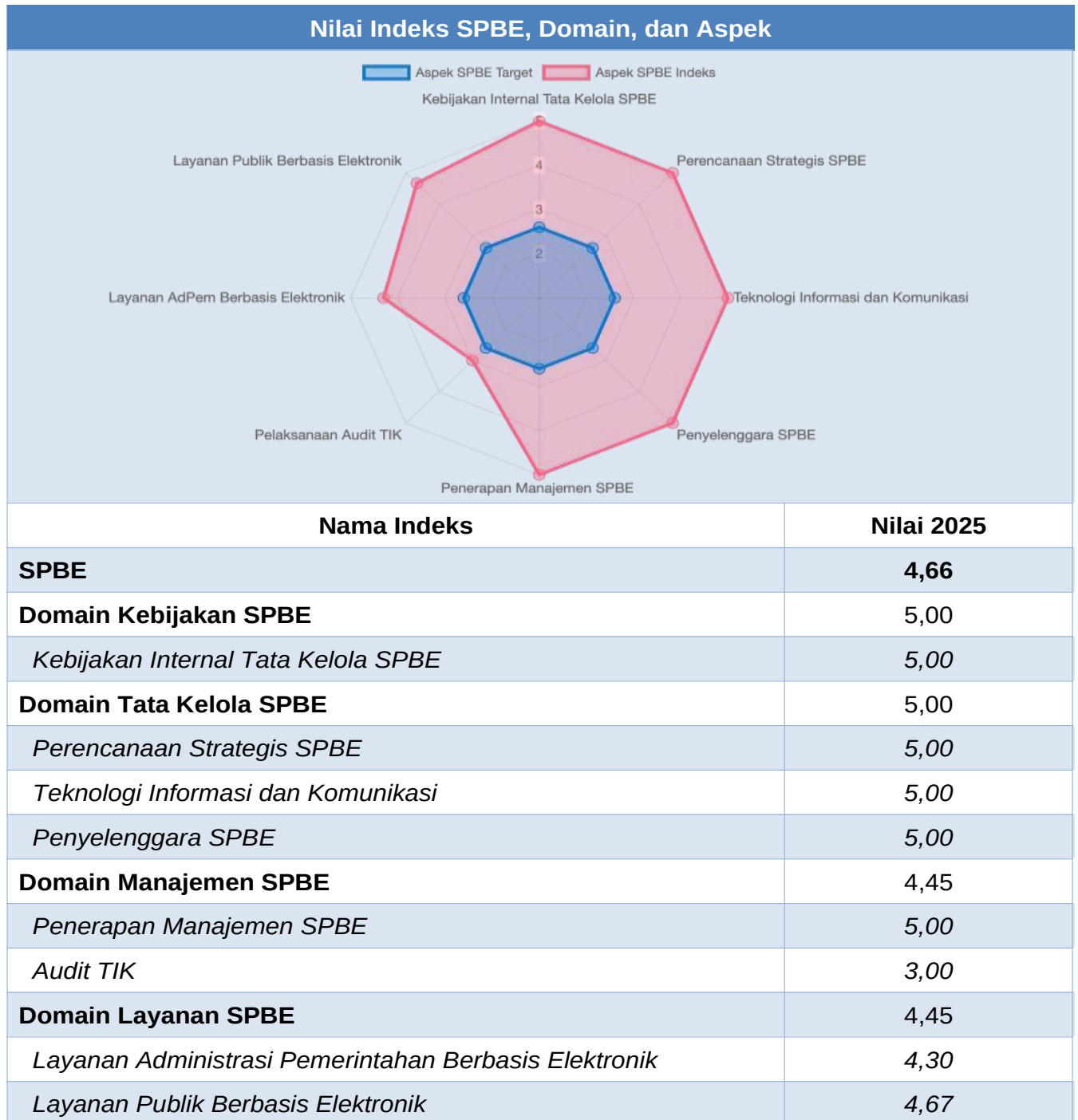
PEMANTUAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
TAHUN 2025

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE		
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%	NO	NILAI	PREDIKAT
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%			
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%			
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%			
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%			
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%	1	4,2 - 5,0	Memuaskan
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%	2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%	3	2,6 - < 3,5	Baik *)
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%	4	1,8 - < 2,6	Cukup
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%	5	< 1,8	Kurang
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%	*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)		
Aspek 8 - Layanan Publik	18%			

Indeks	Nasional	Kementerian	LPNK	LNS dan Lainnya	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	3.23	4.09	3.95	3.34	3.55	2.99	3.52
Kebijakan Tata Kelola	3.48	4.37	4.24	3.54	3.82	3.24	3.73
Kebijakan Tata Kelola	3.48	4.37	4.24	3.54	3.82	3.24	3.73
Tata Kelola	2.76	3.96	3.83	3.08	3.24	2.39	3.13
Perencanaan	2.56	3.84	3.88	2.96	3.11	2.20	2.83
TIK	2.87	4.02	3.85	3.10	3.33	2.51	3.30
Penyelenggara	2.92	4.07	3.70	3.31	3.36	2.55	3.41
Manajemen	2.00	2.91	2.85	2.28	2.38	1.73	2.24
Manajemen	2.06	2.99	2.91	2.37	2.43	1.78	2.32
Audit	1.84	2.70	2.68	2.05	2.22	1.60	2.04
Layanan SPBE	3.87	4.50	4.34	3.81	4.07	3.70	4.13
Layanan Adm. Pemerintahan	3.85	4.42	4.29	3.87	4.02	3.70	4.07
Layanan Publik	3.90	4.63	4.43	3.71	4.16	3.69	4.23

Distribusi Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat Tahun 2025



INDEKS SPBE – PEMERINTAH KOTA BANDUNG
4,66
 (Memuaskan)


Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator
Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2025
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	5
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	5
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	5
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	5
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	5
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	5
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	5
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	5
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	5
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5

18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	5
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	5
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	5
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	5
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	5
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE	5
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	5
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	5
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	5
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	3
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	3
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	3
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	5
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	5
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	5
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	5
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4

38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	5
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	4
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	5
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	5
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	5
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	4
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	5

Dokumen Rapat Progres Persiapan Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis







BAB IV

PENUTUP

LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

LKIP adalah gambaran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Berdasarkan Rencana Strategis 2025-2029, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung menetapkan sebanyak 2 (Dua) sasaran dengan 2 (Dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai.

Sasaran Pertama Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan target 4,62 Nilai terealisasi 4,66 Nilai (100,87%) atau melebihi dari target yang telah ditentukan.

Sasaran Kedua yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target sebesar 95,90 poin terealisasi 96,05 Nilai (100,16) atau melebihi target yang ditentukan.

Untuk mencapai optimalisasi dari tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung yang direalisasikan melalui berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan, perlu adanya kesinambungan Program/kegiatan/sub kegiatan dengan didukung dana yang memadai serta fasilitas/sarana penunjang lainnya. Oleh karena itu, program dan kegiatan yang memerlukan adanya kesinambungan akan terus diusulkan sebagai program, kegiatan dan sub kegiatan di masa yang akan datang.

Selain program dan kegiatan yang bersifat rutin, diupayakan pula adanya program dan kegiatan yang merupakan inovasi baru dalam pengelolaan urusan komunikasi dan

informatika, urusan statistis dan urusan persandian di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang akan diajukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dalam perencanaan tahun selanjutnya atau Tahun 2026 agar direkomendasikan untuk mendapat pertimbangan lebih lanjut.

Rekomendasi, saran dan tindak lanjut yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja ditahun mendatang, yaitu;

Rekomendasi

1. Secara prinsip penerapan SPBE melauai implementasi kebijakan internal, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE pada Kota Bandung. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Kota Bandung sudah dapat menggambarkan predikat memuaskan dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan
Keunggulan penerapan SPBE terletak pada aspek kebijakan yang sudah terkoordinasi dan didukung oleh perencanaan strategis, aspek TIK, penyelenggaraan, penerapan manajemen, maupun layanan baik yang berbasis administrasi dan publik namun pada aspek audit masih internal, sehingga agar dilakukan audit eksternal pada tahun depan, terutama Tingkat kematangan pelaksanaan audit infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE dan Audit Keamanan SPBE.
2. Perlunya peningkatan pemahaman dan kecepatan dalam layanan dinas terutama pemahaman tugas dan fungsi yang diemban oleh masyarakat.

Saran

1. Perlu adanya dukungan atau komitmen intern perangkat daerah untuk meningkatkan beberapa domain penilaian khususnya Tingkat Kematangan Penerapan Audit.
2. Diharapkan dapat memberikan pemahaman tugas dan pokok diskominfo sesuai dengan peraturan yang ada, karena kewenangan pusat seperti; pelayanan untuk memblokir situs yang bersifat negatif. Pemahaman kepada masyarakat itu ditindaklanjuti dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan menggunakan internet bersifat bijak kepada sekolah-sekolah maupun kepada orang

tua murid untuk selalu mengawasi anak-anaknya dalam melakukan kegiatan browsing di internet.

Tindaklanjuti

1. Dalam rangka peningkatan penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2026 akan bertransformasi ke Pemerintahan Digital dengan Indeks Pemerintah Digital. Indikator Pemerintah Digital ini menjadi bukan hanya tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung saja melainkan tanggung jawab semua perangkat daerah lainnya.
2. Meningkatkan layanan kepada masyarakat terutama layanan yang berbasis elektronik seperti; Aplikasi layanan Pesona yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pemahaman melalui pelatihan di Tahun 2026.

Dengan tersusunnya LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Bandung, 31 Desember 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika



YAYAN AHMAD BRILYANA, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19731127 199303 1 003